



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.691-ORPAD/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Pegawai Negeri Sipil yang handal serta mewujudkan sumber daya manusia sebagai aparatur yang profesional dengan jalur jabatan fungsional melalui sistem prestasi kerja, maka telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.288-Huk/2007 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam perkembangannya, untuk meningkatkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta beban kerja, dan untuk itu Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan keuangan daerah dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.288-Huk/2007 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

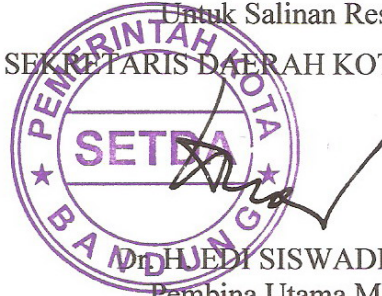
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.691-ORPAD/2011

TANGGAL : 12 September 2011

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
(1)	(2)	(3)
1.	Pamong Belajar	Kementrian Pendidikan Nasional
2.	Guru	Kementrian Pendidikan Nasional
3.	Pengawas Sekolah	Kementrian Pendidikan Nasional
4.	Pranata Laboratorium Pendidikan	Kementrian Pendidikan Nasional
5.	Penilik	Kementrian Pendidikan Nasional
6.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kementrian Pendidikan Nasional
7.	Dokter	Kementrian Kesehatan
8.	Dokter Gigi	Kementrian Kesehatan
9.	Perawat Gigi	Kementrian Kesehatan
10.	Perawat	Kementrian Kesehatan
11.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Kementrian Kesehatan
12.	Apoteker	Kementrian Kesehatan
13.	Asisten Apoteker	Kementrian Kesehatan
14.	Pratana Laboratorium Kesehatan	Kementrian Kesehatan
15.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kementrian Kesehatan
16.	Epidemolog Kesehatan	Kementrian Kesehatan
17.	Entomolog Kesehatan	Kementrian Kesehatan
18.	Sanitarian	Kementrian Kesehatan
19.	Administrator Kesehatan	Kementrian Kesehatan
20.	Nutrisionis	Kementrian Kesehatan
21.	Bidan	Kementrian Kesehatan
22.	Radio Grafer	Kementrian Kesehatan
23.	Perekam Medis	Kementrian Kesehatan
24.	Teknisi Elektromagnetis	Kementrian Kesehatan
25.	Fisio Terapis	Kementrian Kesehatan
26.	Refraksionis Optisien	Kementrian Kesehatan
27.	Terapis Wicara	Kementrian Kesehatan
28.	Ortotis Prostetis	Kementrian Kesehatan

29.	Okupasi Terapis	Kementerian Kesehatan
30.	Teknisi Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan
31.	Teknisi Gigi	Kementerian Kesehatan
32.	Psikolog Klinis	Kementerian Kesehatan
33.	Fisikawan Medis	Kementerian Kesehatan
34.	Pengantar Kerja	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
35.	Pengawas Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
36.	Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
37.	Instruktur	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
38.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
39.	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial
40.	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial
41.	Pemeriksa Pajak	Kementerian Keuangan
42.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Kementerian Keuangan
43.	Pemeriksa Pajak	Kementerian Keuangan
44.	Penyuluh Pajak	Kementerian Keuangan
45.	Teknisi Siaran	Kementerian Keuangan
46.	Adikara Siaran	Kementerian Keuangan
47.	Andalan Siaran	Kementerian Keuangan
48.	Penera	Kementerian Perdagangan
49.	Penguji Mutu Barang	Kementerian Perdagangan
50.	Penyuluh Perindag	Kementerian Perdagangan
51.	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian
52.	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian
53.	Pengawas Benih Tanaman	Kementerian Pertanian
54.	Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian
55.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Kementerian Pertanian
56.	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian
57.	Pengawas Mutu Pakan	Kementerian Pertanian
58.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian
59.	Pengawas Benih Ikan	Kementerian Kelautan & Perikanan
60.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Kementerian Kelautan & Perikanan
61.	Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan & Perikanan
62.	Penyuluh Perikanan	Kementerian Kelautan & Perikanan
63.	Pamong Budaya	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
64.	Teknik Pengairan	Kementerian Pekerjaan Umum
65.	Teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum
66.	Teknik Tata Bangunan dan Permahan	Kementerian Pekerjaan Umum

67.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Kementrian Pekerjaan Umum
68.	Penata Ruang	Kementrian Pekerjaan Umum
69.	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementrian Perhubungan
70.	Pengendali Frekuensi Radio	Kementrian Perhubungan
81.	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementrian Negara Lingkungan Hidup
82.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementrian Hukum dan HAM
83.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Kementrian Dalam Negeri
84.	Penerjemah	Sekretariat Negara
85.	Widyaiswara	LAN
86.	Perencana	BAPENAS
87.	Analisis Kepegawaian	BKN
88.	Arsiparis	ANRI
89.	Pustakawan	PERPUSNAS
90.	Auditor	BPKP
91.	Operator Transmisi Sandi	LSN
92.	Sandiman	LSN
93.	Peneliti	LIPI
94.	Penyuluh Keluarga Berencana	BKKBN
95.	Pranata Hubungan Masyarakat	LIN
96.	Pranata Komputer	BPS
97.	Statistisi	BPS

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007